

ISSN : 9772302748003

PROSIDING

Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi
Serang, 3 - 4 Oktober 2012



KONTRIBUSI ILMU KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN



Diselenggarakan Oleh:

Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP Untirta - Banten

PROSIDING :
SEMINAR DAN KONFERENSI NASIONAL ILMU KOMUNIKASI
"Kontribusi Ilmu Komunikasi Bagi Pembangunan Daerah"
Serang, 3 - 4 Oktober 2012

Hak Cipta © Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta - Banten

Kata Pengantar : Neka Fitriyah, S.Sos, M.Si

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta - Banten
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Kota Serang - Banten
Telp. 0254 - 280 330 ext 228

PEMBINA
Dr. Agus Sjafari, M.Si (Dekan FISIP Untirta)

PENANGGUNG JAWAB
Neka Fitriyah, S.Sos, M.Si (Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta)

KETUA PENYUNTING
Idi Dimiyati, S.Ikom, M.I.kom

ANGGOTA PENYUNTING
1. Husnan Nurjuman, M.Si
2. Puspita Asri Praceka, M.I.Kom

Tata Letak :
Ade Haer

Design Sampul :
Ade Haer

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pemilik hak cipta

Cetakan Pertama, November 2012
xxii + 338 hlm.; 21cm x 29 cm

ISSN : 9772302748003



Setiap buku la
Komunikasi F
peristiwa dan b
pula makalah
saya langsung
sudah seputra

Berhatikan pro
komunikasi, se
pengembangan
tema kami dis
dan pembinaan

Karena keterba
hian, tetapi b
di Untirta, dim
pembaharuan,
hingga pertany
dapat menjawab

Beginipula pe
gunan yang ma
ing ini memilik
khususnya dal

Tema-tema dal
tema-tema yan
diantaranya: Pe
dalam Realitas
Globalisasi, Co
Massa dalam P
dan Pembeday

Dapat dilihat
perguruan tingg
Untirta dan da
banggakan, arti
dipercaya dalam

Terakhir kami
kami menyada
kata pengantar

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Materi Pemakalah Seminar	
• Etnografi Sebagai Upaya Menempatkan Kebijakan Pembangunan Berlandaskan pada Masyarakat dan Kebudayaan - <i>Ahmad Sihabudin</i>	vii
• Dinamika Teknologi Komunikasi dan Perubahan Sosial Masyarakat - <i>Eddy Kurnia</i>	xii
Bagian I :	
Peran Etika Komunikasi Politik dalam Membangun Kredibilitas Pemerintah	
- Pentingnya Penciptaan dan Promosi Landmark Provinsi Banten – <i>Ari Pandu Witantra</i>	1
- Sinyo Harry Sarundajang: Mengatasi Konflik Maluku dan Maluku Utara dengan Pendekatan Dialogis - <i>H. H. Daniel Tamburian</i>	5
- Konstruksi Pluralisme Agama pada Kampanye Politik: Studi Etika Komunikasi - <i>Husnan Nurjuman</i>	11
- Politik dan Komunikasi Pesantren Salafiyah dalam Proses Demokratisasi di Banten - <i>Ikhsan Ahmad</i>	19
- Komunikator Politik Ideal dan Dramaturgi dalam Strategi Kampanye Politik - <i>Novi Andayani Praptiningsih</i>	25
- Strategi Pembangunan daerah Melalui Riset Komunikasi - <i>Siti Komsiah</i>	33
Bagian II :	
Representasi Gender dalam Realitas Sosial Budaya Bangsa Indonesia	
- Representasi Gender pada Profesi Wartawan – <i>Darwis Sagita</i>	41
- Peran Perempuan dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga - <i>Helen Diana Vida</i>	49
- Peran Customer Relations dan Diskriminasi Perempuan - <i>Muhammad Najih Farihanto</i>	55
- Pemberdayaan Perempuan sebagai <i>Agent of Change</i> dalam Pengelolaan Lingkungan Bantaran Kali Ciliwung - <i>Nurprati Wahyu Widyatuti</i>	61
- Quo Vadis Pengarusutamaan Gender: Representasi Kebijakan Pemerintah dan Realitas Sosial Masyarakat Banten - <i>Neka Fitriyah</i>	71
- Konstruksi Perempuan Pelaku Kejahatan Kasus Melinda Dee dan Afriani Susanti - <i>Suzy Azeharie</i>	77
- Menggugat Kesenjangan Gender sebagai Sebuah Vision Bangsa – <i>Yoyoh Hereyah</i>	81
Bagian III:	
Peran dan Tantangan New Media bagi Pembangunan di Era Globalisasi	
- Twitter "Anak" New Media yang Revolusioner: Medium Pembangun Globalisasi - <i>Genep Sukendro dan Sisca Aulia</i>	81
- Ponsel dan Budaya Komunikasi Masyarakat Indonesia – <i>Idi Dimyati</i>	97
- Kredibilitas Pemerintah Di Mata Media Online (Framing pemberitaan kredibilitas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di media online) - <i>Indiwan Seto Wahyu Wibowo</i>	103
- Transformasi Sistem Media Baru Konteks Indonesia: Aktivisme Internet oleh LSM dan Pembentukan Ruang Publik Alternatif - <i>Lidwina Mutia Sadasri</i>	111
- Peran Facebook dalam Menciptakan Interaksi antara Kanwil Kesehatan propinsi dengan Ibu Hamil dalam Menurunkan Tingkat Kematian Ibu Saat Melahirkan – <i>Muhammad Adi Pribadi</i>	119
- SMS Broadcast untuk Pemberdayaan Masyarakat - <i>Rendra Widyatama dan Tawar</i>	125
- Analisis McQuail Set pada Website bagi Pembangunan Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi - <i>Rustono Farady Marta</i>	131
- Media Baru dan Demokratisasi di Indonesia - <i>Sugeng Wahjudi</i>	137

Bagian IV:

Corporate Social Responsibility dan Pembangunan Daerah

- Sinergi antara Social Business Enterprise dengan Pemerintah Daerah - *Euis Heryati* 149
- Peran Komunikasi dalam Program Investasi Sosial Perusahaan (Sebuah Analisis Praktis dari Sektor Hulu Migas) - *Halida Hatta & Alfred Menayang* 157
- Program Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Balongan (Kasus PT Pertamina Refinery Unit VI Balongan) - *Ilona V Oisina Situmeang* 165
- Adopsi Inovasi Kelestarian Lingkungan ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan - *Rahmi Winangsih* 173
- Konsep Komunikasi Pemasaran Terintegrasi melalui Sister City Branding di Kota Serang - *Rd Nia Kania K* 185
- Program CSR sebagai Salah Satu Peranserta Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Majemuk - *Riris Loisa & Yugih Setyanto* 195
- Optimalisasi Program CSR dalam Pembangunan Daerah - *Titi Setiawati* 201

Bagian V:

Peran dan Pemanfaatan Media Massa dalam Pembangunan Daerah

- Media Televisi dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan - *Doddy Salman* 209
- Media Massa sebagai Sumber Kekuatan Pembangunan Daerah - *Eko Harry Susanto* 215
- Peran Media Massa dalam Penanganan Pencemaran Air sebagai Bagian Pembangunan Daerah Banten - *Dianingtyas Murtanti Putri* 223
- Pemanfaatan Media Radio sebagai Media Rakyat untuk Pembangunan Daerah - *Farid Rusdi* 231
- Media Massa Cetak Lokal sebagai Public Sphere Pembangunan Banten yang Bermartabat - *Iman Mukhroman* 237
- Media dalam Politik dan Politik Dalam Media - *Rangga Galura G* 243
- Kontribusi Media dalam Pembangunan di bawah Kekuasaan Konglomerat - *Rangga Galura G dan Olivia Hutagaol* 251
- Komodifikasi Mitologi Rakyat dalam Tayangan Mistik di Televisi - *Naniek Afrilla Framanik* 263

Bagian VI:

Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Peran Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian - *Asih Mulyaningsih* 271
- Komunikasi Kelompok dan Pengembangan Potensi Masyarakat Peternak Sapi Perah di Lembang - *Damayanti W* 275
- Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima - *Ida Nur'aini Noviyanti* 283
- Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Serang - *Ipah Ema Jumiati* 289
- Publik dan Media, Kawan atau Lawan: Media Literasi sebagai Sarana Penguatan Peran Publik di tengah Gempuran Ekonomi Politik Media - *Mufti Nurlatifah* 301
- Strategi Komunikasi: Aplikasi Metode Edukatif dalam Sosialisasi Keluarga Berencana Masyarakat Pedesaan - *Nina Yuliana* 309
- Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat - *Tia Muthiah Umar* 319
- Hubungan Karakteristik Anggota dan Efektifitas Komunikasi Organisasi Anggota KUD Mandiri Panca Usaha Palabuhanratu - *Yudi L.A Salampessy* 325

Lampiran

333

Media Massa Sebagai Sumber Kekuatan Pembangunan Daerah

Eko Harry Susanto ¹

Abstrak

dengan reformasi politik yang menuntut transparansi informasi, berdampak terhadap posisi media yang semula dipakai sebagai salah satu instrument politik pemerintah beserta sayap – sayap politiknya, mengalami perubahan peran. Media massa menjadi entitas independen yang memiliki kekuatan penyebaran informasi. Dalam posisinya yang tidak memihak dan transparan dalam pemberitaan maupun media dapat meningkatkan wawasan masyarakat dalam menyikapi pembangunan di daerah yang dengan tujuan otonomi daerah. Dengan dukungan media massa yang peduli terhadap program-program di daerah, pemerintah dapat memanfaatkan media untuk menyosialisasikan program pembangunan di pelosok pedesaan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, bukan melibatkan diri dalam program pembangunan yang berpihak kepada rakyat, tetapi melalui informasi dari media massa, juga ikut mengawasi jalannya pembangunan daerah, agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Artinya, media massa sebagai salah satu pilar demokrasi dalam kehidupan bernegara, memiliki kekuatan proses pembangunan daerah yang berpihak kepada pelayanan kepada public yang lebih baik.

persoalannya, ketika media massa tumbuh dengan pesat, dan didukung oleh regulasi di bidang pers dan penyiaran, yang berorientasi kepada demokratisasi dan terbentuknya masyarakat informasi, ternyata tidak media, mampu menjalankan profesionalisme pemberitaan dan penyiaran dengan baik. Ada kendala yang menghambat tugas maupun tanggungjawab media, yang tidak sejalan dengan etika jurnalistik, transparansi dan sikap independen, yang dipicu oleh ketidakprofesionalan pekerja media, kecenderungan bisnis yang bebas dan ideologi pemilik media. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, dalam belenggu hambatan keuangan, media massa melakukan transaksi dalam pemberitaan dan penyiaran dengan pemerintah daerah. Akibatnya, media lebih banyak mendukung program pembangunan daerah, dibandingkan bersikap kritis dan transparan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : media massa, transparansi, pembangunan daerah

Pendahuluan

Salah satu tuntutan reformasi politik tahun 1998 adalah demokratisasi komunikasi dalam koridor kebebasan pers, yang secara substantif menyangkut pemberitaan dan penyiaran. Faktor yang melekat di dalamnya adalah transparansi informasi dari semua pihak pendukung kekuasaan negara. Pada konteks ini tidak terkecuali masyarakat yang harus mendukung pembukaan informasi pemberitaan. Sebab, tidak dibayangkan bahwa kebebasan komunikasi, akan berhadapan pula dengan aspek kultural masyarakat, yang sangat terbiasa dengan ketertutupan dan rahasia dalam ikatan "menjaga nilai" sosial budaya yang bersifat paternalistic

Ketertutupan informasi seringkali dipakai sebagai salah satu dalih dari elite politik dan elite dalam kekuasaan negara, untuk tidak transparan dalam menyampaikan informasi seputar jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan. Padahal, dalam rangka membangun masyarakat informasi yang beradab, pemerintah harus secara terbuka menginformasikan semua kegiatan kepada rakyat. Bisa saja merahasiakan, jika didukung oleh

peraturan yang mengisaratkan bahwa kegiatan tertentu tidak bisa didifusikan kepada publik karena pertimbangan keamanan bangsa dan negara

Dalam ranah pembicaraan kebebasan berkomunikasi di masyarakat, peran media massa sebagai institusi yang memiliki fungsi menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat, dituntut untuk selalu berpijak kepada kepentingan "terbentuknya masyarakat informasi" yang dinamis, sehingga mengetahui perencanaan, proses, hasil dan manfaat pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Menyangkut informasi pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat, media massa wajib memposisikan sebagai entitas pemberitaan dan penyiaran yang tidak memihak kepada para elite ekonomi, politik maupun elite di tubuh pemerintahan. Dalam koridor kebebasan pers yang menjadi pedoman, media harus mengedepankan independensi dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.

Kalaupun media, dalam menjalankan fungsinya juga dituntut untuk melakukan kegiatan yang komersial, demi untuk mempertahankan institusi dan

kesejahteraan para jurnalis dan pekerja lainnya, tetapi bukan berarti, mengabaikan prinsip independensi pemberitaan dan penyiaran. Prinsipnya, media massa harus tetap menjalankan profesionalisme demi untuk mencerdaskan ataupun meningkatkan wawasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, jika media hanya berfokus kepada orientasi bisnis untuk memperoleh keuntungan, tanpa ideologi pemberitaan yang menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme, maka sulit untuk menempatkan diri sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh khalayak. Kondisi tersebut, senada dengan pendapat Baran (2012:24), yang mengemukakan, uang memang mengubah komunikasi menuju kearah kepentingan tertentu. Uang menggeser juga keseimbangan kekuasaan, dan cenderung membuat khalayak menjadi produk daripada menjadi konsumen yang berhak memperoleh faedah informasi.

Padahal kekuatan utama media adalah, jika media tersebut dipakai sebagai sumber informasi ataupun rujukan masyarakat dalam mencari berita yang dipercaya kebenarannya. Dengan menempatkan transparansi sebagai ideologi media, maka masyarakat sebagai khalayak media, bias lebih leluasa untuk menerima informasi tentang berbagai kegiatan pembangunan yang ada di daerahnya, maupun diberbagai wilayah lain, yang dapat dipakai sebagai pembandingan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Intisarinnya, media massa diharapkan menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat yang lebih luas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat juga memahami gambaran ideal tentang pembangunan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Terlebih lagi dalam bingkai otonomi daerah, yang mengamanatkan agar pemerintahan di daerah melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat setempat, maka media massa harus mengedepankan nilai informasi yang transparan dan memberikan manfaat factual kepada rakyat, sehingga tidak ada tuduhan bahwa media massa, dipakai sebagai instrumen politik pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan yang dikeluarkan walaupun kurang berpihak kepada masyarakat setempat.

Padahal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan prinsip otonomi adalah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, demi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah dan eksistensi media

massa, harus berjalan sehaluan dalam memberikan informasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Merujuk kepada pendapat klasik Schramm (dalam Susanto, 2010:46) bahwa "media mass khususnya radio, televisi dan surat kabar berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat". Tetapi memang tidak mudah untuk mengedepankan profesionalisme dalam pemberitaan, yang mampu memberikan manfaat kepada khalayak. Sebab, dengan berlandung dibalik kebebasan berekspresi, maka media massa juga terperangkap pada kubu politik dan ekonomi, yang menafikan keberpihakan kepada masyarakat. Media massa cenderung dipakai oleh kelompok - kelompok yang memiliki kepentingan politik dengan segala implikasi faktual dalam pembangunan.

Menarik untuk dicermati adalah pendapat McQuail (1991:109), penyebaran informasi melalui media massa adalah dominasi "kekuasaan politik" sehingga jauh dari hak atau kebebasan masyarakat, untuk mendapatkan informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang kredibilitasnya diakui. Berpijak kepada pendapat itu, maka media massa harus menjalankan fungsi penyebaran informasi pembangunan yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimanapun besarnya hambatan dalam penyebaran berita yang transparan, tetapi tidak dapat disangkal idealisme media, merupakan salah satu kunci yang menempatkan media massa sebagai sumber kekuatan dalam menukung pelaksanaan pembangunan daerah.

II. Media Massa Pasca Reformasi Politik

Sejalan dengan tuntutan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, media massa yang sebelumnya cenderung dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi massa dan digunakan sebagai instrument politik pemerintah, berubah menjadi media massa yang memiliki kebebasan pemberitaan dan penyiaran. Dalam bingkai pers sebagai subordinat kekuasaan negara yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah, media massa cenderung sejalan dengan model pers pembangunan.

Menurut McQuail (1991: 120) pendekatan teori itu pada prinsipnya meliputi (1) media seyoganya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. (2) Kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat, (3). Media perlu memprioritaskan isi pada kebudayaan dan bahasa nasional, (4). Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya, yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan atau politik. (5). Para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya.

(6) Bagi kepentingan memiliki hak untuk pengoperasian dan pengendalian

Melalui mo informasi yang rangkaian kontr otoritas pemberit oleh pemerintah d negara. Akibatnya identik dengan ke terbelenggu oleh j kehidupan masya sesuai penafsiran l

Namun ko sebagai instrumen menghilang, karen tidak ada lagi cam peran media massa masih saja pemerit pemberitaan media tahun 1999, tenta kebebasan da maupun informasi, kemerdekaan pers, rakyat yang harus ada lagi lagi interve mengontrol ataupun

Walaupun b dapat menikmati menyampaikan pes pihak - pihak y institusi pemerintah tidak menghendaki erat nilai paternal mengedepankan nil ekonomi kelompok, dianggap sebagai an di tubuh pemerintah pembangunan serta masyarakat.

Karena itu, da selubung dari l menyukai kebebasan harus konsisten me pemberitaan maupun wawasan yang lebih lustru yang menja internal pada aspek organisasi media ma jurnalis dan edepaskan diri dari l ang selalu berupaya dalam menjalankan fu bahkan lebih celaka kebijakan pembang pimpinan organisasi n sebagai sub ordinat

bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, atau membatasi, pengawasan media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media.

Melalui model media pembangunan, berbagai informasi yang didifusikan harus melewati rangkaian kontrol berlapis dari para pemegang otoritas pemberitaan dan penyiaran yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya melindungi kekuasaan negara. Akibatnya, pemberitaan media massa bertik dengan kemauan politik pemerintah, yang terbelenggu oleh jargon stabilitas dan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif sepihak atau penafsiran kepentingan pemegang kekuasaan.

Namun kondisi yang memposisikan media sebagai instrumen pemerintah, lambat laun menghilang, karena secara legal formal memang tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap media massa. Walaupun dalam aspek faktual, masih saja pemerintah berupaya untuk mengontrol pemberitaan media. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers, yang memiliki semangat kebebasan dalam menyampaikan pendapat maupun informasi, mengamanatkan tentang perlunya kemerdekaan pers, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang harus ditegakkan. Oleh sebab itu, tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun untuk mengontrol ataupun menyensor pemberitaan.

Walaupun begitu, tidak berarti media dapat menikmati kebebasan tanpa batas dalam menyampaikan pesan kepada publik, sebab ada pihak – pihak yang berkepentingan di tubuh institusi pemerintahan dan masyarakat, yang tidak menghendaki demokrasi informasi. Dalam nilai paternalistik dan komunalisme, yang mengedepankan nilai – nilai sosial kultural dan ekonomi kelompok, maka transparansi media massa dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan elite tubuh pemerintah maupun entitas yang menikmati pembangunan serta memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Karena itu, dalam upaya mencegah intervensi dan campur tangan dari berbagai pihak yang tidak menyukai kebebasan pers, maka para pekerja media harus konsisten menjunjung tinggi independensi pemberitaan maupun penyiaran demi meningkatkan wawasan yang lebih luas kepada khalayak. Namun yang menjadi persoalan adalah hambatan internal pada aspek kelembagaan media. Pimpinan organisasi media massa, sebagai payung organisasi para jurnalis dan pekerja media, belum bisa melepaskan diri dari kekuasaan politik dan ekonomi yang selalu berupaya untuk mengendalikan media dalam menjalankan fungsi pemberitaan dan penyiaran. Semakin lebih celaka lagi, dalam menyosialisasikan pembangunan di daerah, justru para pimpinan organisasi media masih saja, memposisikan sebagai sub ordinat dari para pemegang kekuasaan

politik dan para pemilik modal. Akibatnya, media massa lebih berpihak kepada mereka yang memiliki modal dibandingkan membela kepentingan rakyat.

Padahal kekuatan media massa adalah kemandiriannya dalam mendifusikan berita yang independen dan berpihak kepada kepentingan publik. Tetapi ternyata, dengan regulasi yang memberikan kebebasan, justru fungsi – fungsi ideal media massa, tidak bisa sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40/1999. Dalam tataran regulasi, para praktisi ataupun pekerja media selayaknya jika mengacu kepada Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) dan norma lain dari berbagai kelompok jurnalis. Namun faktanya, dalam upaya menyebarkan informasi pembangunan daerah, masih ditemukan ketidaktransparanan media massa dalam pemberitaan, karena berkaitan dengan kepentingan politik maupun ekonomi dari kelompok yang berkuasa ataupun memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Sudah barang tentu, gambaran ini bertentangan dengan tuntutan masyarakat terhadap eksistensi pers yang bebas dari kepentingan dan tekanan dari pihak manapun.

Memang media massa tidak bisa dilepaskan dalam situasi politik. Karena itu, ketika politik memegang peran dominan dalam pemerintahan yang berupaya menerapkan pembangunan sejalan dengan otonomi daerah, maka media massa khususnya di daerah bisa saja justru mengikuti atau terlibat dalam dinamika politik yang penuh dengan persaingan dalam menanamkan pengaruh kekuasaan.

Dilihat dari fungsinya, media massa mampu menggambarkan realitas politik, namun harus diingat pula bahwa kehidupan pers di suatu negara akan mengikuti sistem yang hidup dalam negara yang bersangkutan. Dengan demikian setiap negara mempunyai sistem pers sendiri. Denis McQuail (1991) menegaskan, "pada dasarnya sistem pers adalah sub sistem dari sistem politik yang ada". Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah media massa memegang peranan penting di dalam kehidupan politik.

Pendapat tersebut, seiring dengan pernyataan DeFleur (1970 : 11), yang menyebutkan, "bahwa kekuasaan politik dan media massa mempunyai hubungan yang saling kuat". Keterkaitan dua hal tersebut selalu menjadi persoalan yang menarik dalam menelaah pembangunan dan kekuasaan politik pemerintah. Walaupun sesungguhnya media massa harus independen dalam menjalankan peran ideal untuk memperluas wawasan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berpijak pada upaya tersebut, maka media harus mampu membangun masyarakat informasi yang memahami peran dan isi media dalam menjalankan fungsi informasi. Menurut Art Silverblatt (dalam Baran, 2012:34), membuat masyarakat melek media

dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut :
(1) Keterampilan berpikir kritis, memungkinkan anggota khalayak untuk mengembangkan penilaian yang independen terhadap isi media. (2) Pemahaman terhadap proses komunikasi massa, mendorong ekspektasi agar media memberikan pelayanan kepada khalayak dalam membatasi, mengembangkan pesan dan memperoleh umpan balik yang efektif. (3) Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. (4) Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media, memberikan pemahaman bahwa, interpretasi isi media bukan terletak pada para pencipta isi media tetapi khalayak. (5) Sebuah kesadaran akan media sebagai suatu teks yang menyediakan wawasan bagi budaya dan kehidupan kita. (6) Kemampuan untuk menikmati, memahami dan mengharagai isi media. Bukan berarti tidak menyukai apapun yang ada dalam media dan selalu curiga, tetapi bisa menghargai dan memahami. (7) Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan bertanggungjawab. (8) Pemahaman akan kewajiban etis dan moral para praktisi media.

Sementara itu dalam aspek legal formal, menurut Undang-Undang No 40/1999, Pers nasional mempunyai peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan berita dan informasi yang akurat dan transparan. Dengan peran ini, media massa dapat menjadi salah satu penunjang demokrasi pemerintahan, yang berimplikasi terhadap pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Masih dalam konteks regulasi, Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, juga berupaya mewujudkan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai upaya menuju demokrasi dalam komunikasi yang bermanfaat dalam mendukung jalannya pemerintahan. Penyiaran radio dan televisi merupakan kegiatan komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sebagai alat kontrol dan perekat sosial - kultural masyarakat.

Hakikatnya, regulasi di bidang pemberitaan dan penyiaran sudah mengatur berbagai hal yang terkait dengan fungsi media massa dalam menjalankan peran ideal tanpa terdeferensiasi sosial, politik dan ekonomi. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber yang dipercaya, termasuk dari pemerintah yang berkuasa di tingkat pusat maupun daerah.

Jika dikaitkan dengan teori pers, maka eksistensi UU No.40/1999 dan UU No. 32/ 2002 mengarah kepada kebebasan pers yang diunggulkan sebagai pilar demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dalam tinjauan teoritis, Pers Bebas menurut McQuail, mencakup : Publikasi seyogianya bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, tindakan

penerbitan dan pendistribusian sebaiknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan ijin atau lisensi, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi, atau pengkhianatan dan gangguan keamanan), seyogianya tidak dapat dipidanakan, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu.

Disamping itu, selayaknya media tidak mempunyai kewajiban mempublikasikan segala hal yang terkait dengan kepentingan pemerintah dan berbagai pihak yang memiliki kemauan memanfaatkan media. Dalam hal publikasi, kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal yang berkaitan dengan opini atau keyakinan. Pers bebas juga menganut tidak diperlukannya batasan hukum dalam pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam impor, ekspor atau pengiriman dan penerimaan pesan, diseluruh pelosok negeri. Sedangkan faktor yang berkaitan dengan kerja jurnalis adalah, wartawan harus mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka

Memang kemerdekaan pers di Indonesia tidak sepenuhnya merujuk kepada Teori Pers Bebas. Namun semangat dalam memberikan informasi yang independen dan transparan, serta bebas dari campur tangan pemerintah sudah menunjukkan bahwa dinamika pers Indonesia sehaluan dengan sebagian prinsip pers bebas.

III. Pembangunan Daerah : Fokus Otonomi

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan fisik maupun non fisik kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, pembangunan seringkali dikaitkan pula dengan tujuan politik para pemegang kekuasaan. Jika pembangunan ditafsirkan dengan merujuk kepada kepentingan rakyat, bukan suatu masalah. Namun yang menjadi persoalan adalah, ketika pembangunan dihubungkan dengan keberhasilan pemerintah dan dimanfaatkan sebagai alat politik para pemegang kekuasaan dalam rangka melanggengkan posisi di pemerintahan.

Dengan demikian sangat beralasan jika masalah pembangunan seringkali masuk dalam nuansa politik kekuasaan, dibandingkan upaya untuk menciptakan perubahan yang membawa faedah faktual bagi rakyat. Dalam terminologi Peter L. Berger (1974:31), pembangunan dibedakan dengan modernisasi. Pembangunan menunjuk pada proses yang menyebabkan negara-negara miskin menjadi kaya atau berusaha menjadi lebih kaya, dan juga proses yang menyebabkan negara kaya bertambah kaya atau secara sederhana didefinisikan sebagai perbaikan menyeluruh dalam kesejahteraan penduduk yang dicapai melalui pertumbuhan yang baik dan modernisasi yang

hendaki, sedangkan istilah modernisasi itu sendiri adalah perubahan kelembagaan dan kebudayaan yang menyertai pertumbuhan. Modernisasi adalah sesuatu yang bebas nilai sedangkan pembangunan akan diartikan sebagai kategori politis dan tidak bebas nilai.

Di era otonomi daerah, pembangunan daerah menjadi salah satu titik krusial yang menimbulkan persaingan antara birokrat pemerintah dengan politisi. Antara birokrat dengan birokrat lain, yang didukung oleh partai politik dan politisi, serta antara politisi dengan politisi, yang semuanya berdalih memperjuangkan rakyat. Padahal disinyalir, persaingan itu semata-mata karena memperebutkan dana dalam proses pembangunan di daerah demi untuk kepentingan kelompok.

Memang menelaah pembangunan, akan menghadapi berbagai persoalan beragam, dari persoalan sosial, ekonomi, politik dan sejumlah alasan lain yang terkait dengan perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat yang demikian pesat karena peran media massa. Secara konseptual, pembangunan menurut Rostow (dalam Sukirno, 1985:57), adalah sesuatu yang terus maju, dari suatu tahap yang primitif ke tahap yang lebih maju.

Sementara itu Tehranian (dalam Nasution, 2003:85) menetapkan tiga faktor teoritis yang berhubungan dengan pembangunan yaitu : (1). Pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu bangsa yang melakukan pembangunan; (2). Rasionalisasi sebagai unsur kunci dalam proses pembangunan; (3). Pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat di dunia ketiga. Berpijak pada pendapat itu, pembangunan daerah merupakan kemajemukan, rasionalitas dan kesadaran untuk mengubah kondisi daerah menjadi lebih baik secara fisik maupun non fisik.

Sedangkan unsur-unsur pembangunan dalam kaitannya dengan komunikasi menurut Rogers (1985 :14), adalah : (1) Pemerataan penyebaran informasi keuntungan sosial ekonomi dan sebagainya; (2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dicerminkan oleh desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di daerah pedesaan ; (3). Bersifat mandiri dalam pembangunan dengan mengandalkan potensi sumberdaya setempat dan (4). Memadukan sistem tradisional dan modern untuk menimbulkan sinkretisasi pemikiran lama dan baru, dengan pertimbangan yang berbeda di setiap daerah.

Dalam perspektif pemerintahan di daerah, pembangunan harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan daerah mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan daerah otonomi, atau daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada intinya, terdapat berbagai macam urusan yang berhubungan dengan pembangunan khususnya di kabupaten maupun kota, sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mencakup (1) Perencanaan dan Pengendalian pembangunan, (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) Penanganan bidang kesehatan, (6) Penyelenggaraan pendidikan, (7) Penanggulangan masalah sosial, (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (10) Pengendalian lingkungan hidup, (11) Pelayanan pertanahan, (12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) Pelayanan administrasi penanaman modal, (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan (16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.

Dalam aplikasi faktual pembangunan daerah, menarik untuk dicermati adalah pola pembangunan yang berfokus kepada pertanian. Menurut Fadel Muhammad (2008:297), pembangunan bidang pertanian berbasis "jagung" dikembangkan dalam sembilan pilar, yaitu : (1) pengembangan dan penyediaan alat dan mesin pertanian, dilakukan dengan membangun pusat pelatihan dan pendampingan, (2) Penyediaan dana penjaminan bagi petani, pemerintah daerah menyediakan dana yang cukup besar dan bekerjasama dengan beberapa bank, (3) Penyediaan benih, pupuk dan pengendalian hama penyakit dengan memaksimalkan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, (4) Memperlancar pemasaran, sebagai komponen penting dalam sistem pertanian modern yang menentukan kesuksesan industri pertanian modern, (5) pembangunan jalan pedesaan dan jaringan irigasi, secara bertahap dibangun sistem irigasi sederhana, sedangkan pembangunan jalan dilakukan terutama di daerah yang terisolasi, (6) Posko agropolitan sebagai pusat percontohan yang selangsi berperan sebagai pusat layanan penyuluhan dan diseminasi teknologi, (7) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian, pada akhirnya petani yang menjadi subyek pembangunan. Kesejahteraan petani merupakan tujuan akhir pembangunan agropolitan berbasis jagung, (8) Peningkatan peran Maize Centre, untuk melakukan penelitian dan pengkajian teknologi, serta sebagai pusat pelatihan maupun percontohan paket - paket teknologi, (9) Perencanaan dan koordinasi, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan.

Semua urusan tersebut, secara esensial harus

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pembangunan yang terkait dengan sektor - sektor itu, harus diketahui secara transparan oleh masyarakat, sebagai pihak yang harus dilayani dan bukan sebagai obyek pembangunan daerah semata - mata. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus berorientasi untuk kepentingan pelayanan publik.

Semua program pembangunan daerah yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, juga harus mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan dapat menikmati manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan.

Mencermati urusan daerah yang beragam, maka terlalu sulit jika menjalankan tugas tersebut, tanpa dukungan media massa yang dapat menjalankan fungsi pemberitaan maupun penyiaran secara konsisten, dengan mengedepankan kemerdekaan pers, yang berusaha untuk menjunjung tinggi independensi, transparansi dan sikap profesionalisme lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami program pembangunan di daerah.

IV. Media Massa dalam Kompleksitas Pembangunan Daerah

Keberadaan media massa pasca reformasi politik yang mengedepankan kemerdekaan pers, ternyata penuh dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Karena itu, meskipun regulasi media memberikan penguatan kepada pers untuk bertindak lebih berani mengungkap berbagai persoalan pembangunan daerah, tetapi masih saja muncul hambatan dari berbagai elite khususnya para penguasa politik dan ekonomi yang merasa tidak nyaman dengan peran pers yang diasumsikan terlampaui bebas.

Sedemikian besar keterkaitan antara kekuasaan politik dan media, mengingat para politisi lebih menyukai jika media dapat membangun situasi yang dikehendaki. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan pendapat Olien (1983 : 458) yang pada intinya, media massa memiliki relasi kuat dengan sistem politik yang ada di berbagai - lembaga pemerintah maupun kelompok - kelompok masyarakat pada umumnya dalam suatu negara.

Dalil tentang perlunya harmonisasi dalam masyarakat, adalah pernyataan yang sering dikemukakan oleh pemerintah dan politisi untuk mengendalikan media massa. Melalui kekuatan politik maupun kekuasaan pendanaan. Para pemilik kekuasaan tidak menghiraukan kalau tindakannya menghambat demokrasi yang justru jauh dari prinsip ideal kebebasan pers. Melihat gambaran itu, Menta

(1972 : 78), menyebutkan, yang lebih penting bagi penguasa adalah kontinuitas jalannya pemerintahan dan bisnis yang dilakukan oleh sekelompok elite yang berkuasa secara ekonomis, politis maupun sosial.

Prasangka terhadap media massa yang mengakibatkan tindakan masyarakat yang "kebabalasan" dalam menafsirkan kebenaran, sama dengan model media pembangunan dari McQuail (1987: 119), yang membolehkan pemerintah ikut campur tangan dalam membatasi pengoperasian media dan penyensoran. Memang saat ini tidak ada lagi sensor yang faktual, tetapi pengendalian terselubung dengan cara yang halus maupun kasar masih ditemukan di berbagai pemberitaan yang memicu konflik antara pemereintah dengan media massa.

Dalam konsep ideal, peranan utama media massa adalah menyalurkan informasi. Dengan informasi, masyarakat dapat melakukan reaksi terhadap apa yang sedang terjadi atau melakukan antisipasi terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tanpa informasi, masyarakat tidak sempat melakukan reaksi atau tidak bisa melakukan reaksi atau antisipasi secara tepat yang membahayakan keselamatan hidupnya. (Eisy, 2007:3). Namun sebagai entitas pemberitaan dan penyiaran yang memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah, media massa tetap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pemberitaan yang independen.

Bahkan ideologi media, seringkali dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan independensi pemberitaan. Menurut Lull (1998 :1), ideologi media adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi hingga membentuk perspektif - perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi, dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Ideologi sendiri dipengaruhi asal - usulnya, asosiasi kelembagaan dan tujuan, meskipun sejarah dan hubungan - hubungannya tidak pernah jelas seluruhnya. Hakikatnya, ideologi media adalah idealisme maupun prinsip - prinsip ideal yang dijalankan oleh media massa dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Faktor hambatan dalam menjalankan fungsi media, sedikit - tidaknya berasal dari aspek eksternal dan internal. Hambatan eksternal, menyangkut perilaku elite politik, ekonomi dan elite dalam kekuasaan negara, yang belum bisa menerima transparansi dan independensi pemberitaan. Komunitas ini tidak segan menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol media jika ada pemberitaan yang tidak dikehendaki.

Sedangkan hambatan internal adalah, fondasi pendanaan media yang lemah. Ini mengakibatkan media tidak bisa transparan dalam pemberitaan pembangunan daerah, sebab memiliki ketergantungan terhadap para penguasa politik dan ekonomi, yang

dapat mendikte pemberitaan ataupun penyiaran melalui kekuatan dana. Namun tidak bisa diabaikan, bahwa profesionalisme kerja jurnalis, yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia maupun Kode Etik Asosiasi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) seringkali memicu berbagai persoalan dalam pemberitaan tentang pembangunan daerah.

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia antara lain mencakup : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, tidak membuat berita bohong, fitnah, fitri, dan cabul, tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Sementara itu Kode Etik AJI, antara lain meliputi, jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, mempertahankan prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar, memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Jika media massa mampu menjalankan regulasi dengan baik dan para jurnalis menjunjung tinggi kode etik, maka media memiliki kekuatan ideal dalam mendukung program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Dalam pandangan Hennesy (1990 : 24), media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat, karena mampu mempengaruhi keputusan politik dengan memberikan atau tidak memberikan publikasi terhadap suatu isu. Media massa memiliki tanggungjawab untuk selalu memberikan informasi, tayangan dan siaran yang benar, akurat dan jelas.

Fungsi ideal media massa, harus mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah yang memiliki permasalahan yang kompleks. Daerah memiliki berbagai kegiatan yang harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. masyarakat. Berdasarkan pasal 21 Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, daerah mempunyai hak : (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, (2) Memilih pimpinan daerah, (3) Mengelola aparatur daerah, (4) Mengelola kekayaan daerah, (4) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah, (5) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya lainnya yang berada di daerah, (6) Mendapatkan sumber - sumber pendapatan lain yang sah dan (7) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Menangani urusan yang kompleks itu, elite di daerah sudah selayaknya mampu membangun media relations yang baik, demi mendiseminasikan program - program pembangunan dan menarik partisipasi masyarakat. Dukungan dari rakyat sebagai subyek pembangunan sangat diperlukan agar program pembangunan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. Sebab ketika warga setempat terlibat didalamnya, maka mereka merasa memiliki

dan menjaga kesinambungan pembangunan. Menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah secara substantive dapat berhasil, jika pemerintah mampu memberikan informasi yang transparan dan memberikan kesempatan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari sumber informasi tentang program pembangunan yang dilaksanakan.

Demi untuk menyosialisasikan program pembangunan yang memiliki jangkauan luas, maka media massa adalah entitas yang paling memadai untuk memberikan informasi pembangunan kepada khalayak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta entitas pendukung kekuasaannya dalam melaksanakan program pembangunan harus menghargai profesionalisme jurnalis dan kemerdekaan pers.

Dengan demikian, jika tidak setuju terhadap pemberitaan maupun penyiaran yang mengulas tentang sisi negative pembangunan daerah, maka harus diselesaikan dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan kehendak dan penggunaan kekuatan massa serta sejumlah tindakan lain yang menciderai kebebasan pers di Indonesia.

Di pihak lain, media juga harus mampu memberikan informasi yang bersifat mudah dipahami dan membaur. Tujuannya agar berita tentang pembangunan daerah tidak asing dan berjarak dengan masyarakat pada umumnya. Dalam pendekatan yang universal, menyerap isi media dibutuhkan keterampilan. Menurut Baran (2012:39), kemampuan untuk memahami media meliputi (1) Kemampuan dan kemauan suatu usaha untuk memahami isi media, memberi perhatian dan menyaring berbagai gangguan. (2) Pemahaman dan penghargaan pada kekuatan pesan media massa. (3) Kemampuan untuk membedakan reaksi emosional dan rasional ketika merespon isi media dan bertindak sesuai isi media. (4) Pengembangan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap isi media. (5) Pengetahuan terhadap kesepakatan akan aliran (genre) dan kemampuan untuk mengenali ketika genre dan kemampuan digabungkan dengan yang lain. (6) Kemampuan untuk berpikir kritis tentang isi media, tidak peduli seberapa kredibel sumbernya.

Mencermati uraian tersebut diatas, pada hakikatnya media massa memiliki peran yang cukup penting dalam menyosialisasikan program - program pembangunan daerah. Dengan catatan, jika elite dalam tubuh pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat dan para pemilik modal serta masyarakat sebagai khalayak media massa, juga mampu memahami fungsi ideal media massa dalam menjalankan kemerdekaan pers.

V. Penutup

Pada hakikatnya, dalam bingkai kebebasan media yang didukung oleh berbagai regulasi tentang pemberitaan dan penyiaran dapat meningkatkan

wawasan masyarakat dalam memahami program pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat. Kemerdekaan pers merupakan representasi kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Media massa merupakan entitas kehidupan bermasyarakat di daerah yang harus demokratis, menjaga kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nuran, berupaya memenuhi hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan pembangunan daerah yang bersifat fisik maupun non fisik.

Sebaliknya, jika program pembangunan di daerah yang lebih banyak menguntungkan kelompok – kelompok elite di masyarakat dan sejumlah pemilik modal yang memiliki kekuatan lobi kepada pejabat daerah, maka media massa juga bisa mendorong munculnya fungsi pengawasan dari rakyat.

Namun yang menjadi persoalan adalah, ternyata di era kemerdekaan pers, tidak semua media mampu menjalankan fungsi pemberitaan dan penyiaran yang ideal sesuai dengan regulasi maupun harapan masyarakat. Sebab, muncul pula kecenderungan media massa yang tidak independen dan tidak transparan dalam memberikan informasi. Perilaku media semacam itu karena memiliki ketergantungan dana dari pemerintah, pemilik modal maupun kelompok – kelompok di masyarakat yang memiliki kekuatan paksa terhadap media massa.

Selain itu, tidak bisa diabaikan bahwa, media massa belum sepenuhnya lepas dari pengaruh kelompok dominan dalam industri pemberitaan. Masih ada tekanan tersembunyi dan sistematis terhadap organisasi media. Padahal di pihak lain, masyarakat maupun khalayak justru sudah masuk dalam situasi pers bebas yang menghendaki jurnalis bisa menuntut otonomi profesionalisme dalam organisasi media, demi menghasilkan pemberitaan yang bebas dari unsur tekanan dari pihak manapun. Dengan menjalankan kemerdekaan pers, maka media massa menjadi sumber kekuatan dalam pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J. 2012. Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media dan Budaya, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Berger, Peter, L. 1982. Piramida Kurban Manusia : Erika Politik dan Perubahan Sosial, terjemahan Rachman Tolleng, Jakarta : Penerbit LP3ES
- DeFleur, Melvin L. 1970. Theories of Mass Communication, Second Edition, New York : David McKay Inc
- Eisy, M. Ridlo. 2007. Peranan Media Dalam Masyarakat, Jakarta : Penerbit Dewan Pers
- Henessy, Bernard. 1990. Pendapat Umum, Terjemahan Airuddin Nasution, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Lull, James. 1999. Media : Komunikasi dan Kebudayaan, Jakarta : Penerbit Buku Yayasan Obor.
- McQuail, Denis. 1991. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition, London : Sage Publication
- McQuail, Denis. 2010. Mass Communication Theory : An Introduction, sixth edition, London : Sage Publication.
- Menta, SR. 1972. Emerging Pattern of Rural Leadership, New Delhi : Willy Eastern.
- Muhammad, Fadel. 2008. Reinventing Local Government : Pengalaman Dari Daerah, Jakarta : Elex Media Komputindo – Kompas Gramedia
- Nasution, Zulkarimein. 2003. Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan Penerapannya, Jakarta : Penerbit Rajawali
- Ollien, Clarice N, George A. Donohue and Phillip J. Tichenor (1983), "Structure, Communication and Social Power : Evolution of the Knowledge Gap Hypothesis", Mass Communication Review Yearbook, eds. Ellen Wartella and D. Charles Whitney (ed), Volume 4, Beverly Hill, London : Sage Publications
- Rogers, Everett M. 1985. Komunikasi Pembangunan : Perspektif Kritis, terjemahan Nurdin, Dasmaz, Jakarta : Penerbit LP3ES
- Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susanto, Eko Harry. 2010. Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial, Ekonomi, Politik, Jakarta : Penerbit Mim Wacana Media.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah

Didukung Oleh:

 **infomedia**
by Telkom Indonesia 

